

Keragaan Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Kabupaten Jember

Performance KKP-E Credit in Jember

Sugiarto

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian
Jl. A Yani 70 Bogor*

ABSTRACT

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) is a perfecting program credit form Kredit Ketahanan Pangan (KKP) which done in 2007, the purpose is to help farmer in farming capital. This research showed that the biggest used of KKP-E is in sugar cane farming, then in crop and livestock. Nevertheless, the distribution of the credit is blocked by smooting time to farmer, especially for horticulture KKP-E which will block season. Beside standarad condition which fund is distribution of credit come from banking (executing). Banking has 5 C (Collateral, Character, Capacity, Capitan and Condition), and gentionerally the most difficult condition is colleteral. The spread of farmer as debitur has not achieved all around and only limited to farmer in area which is organised in farmer group organization. So that, it is suggested to have socialization activity together among agency and banking ti ditribute KKP-E to farmer/farmer group.

Keywords: KKP – E credit, performance

Diterima: 07-04-2011, disetujui: 02-09-2011

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan usaha, termasuk usaha tani, memerlukan modal untuk membiayai kegiatan tersebut. Namun sebagian besar petani Indonesia masih sangat lemah dalam memiliki dan mengakses sumber-sumber pemodal formal. Lemahnya kepemilikan modal disebabkan oleh kecilnya skala usaha sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan akumulasi modal. Setiap selesai panen, hasil penjualan hasilnya digunakan untuk membayar pinjaman sarana produksi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, lemahnya akses petani kecil terhadap sumber-sumber pemodal formal disebabkan oleh prosedur yang tidak sederhana dan persyaratan kolateral yang harus dipenuhi oleh petani. Menurut Braverman dan Guasch. 1989 pada kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat pedesaan yang akses terhadap sumber-sumber pemodal. Padahal akses terhadap kredit pemodal merupakan hak dasar manusia yang fundamental dalam meningkatkan usahanya, pendapatan dan kebutuhan dasarnya (Yunus, 1981)

Sebagai langkah peningkatan produksi dan pendapatan, pemerintah telah melakukan kebijakan guna menanggulangi permasalahan pemodal, pada awalnya dalam bentuk program yang terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian, yang diberikan secara massal (Sudaryanto dan Syukur, 2000). Akan tetapi dalam perkembangannya dengan pemberian kredit masal dengan tingkat bunga bersubsidi, menimbulkan polemik yang berkepanjangan karena berbagai penyimpangan (Mat Syukur *et al.*, 2003).

Hingga saat ini telah banyak diperkenalkan berbagai skim pembiayaan usaha pertanian, seperti jenis pembiayaan yang dikenal luas di masyarakat antara lain KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) bersama skim yang ditujukan untuk pengembangan sektor pertanian dan pedesaan. Selain sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari program pemerintah, baik melalui dana dalam negeri maupun pinjaman lunak luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan lain, yaitu sumber pembiayaan formal seperti perbankan dan non perbankan disamping sumber pembiayaan non formal

Menurut data Bank Indonesia, 2010, dari total kredit perbankan nasional sebesar Rp 1.397 triliun, kredit untuk sektor pertanian hanya Rp 77 triliun atau 5,5%, padahal kontribusi sektor pertanian pada pembentukan Produk Domestik Bruto menempati posisi kedua terbesar setelah sektor manufaktur. Pada tahun 2008, misalnya, kredit sektor pertanian hanya merupakan sekitar 9% dari PDB sektor pertanian, yang berarti lebih banyak kegiatan pertanian yang dibiayai sendiri. Sulitnya akses terhadap kredit perbankan juga tecermin pada tingginya suku bunga kredit untuk sektor pertanian yang rata-rata mencapai 13,20% per tahun (BPS 2008).

Melihat permasalahan yang dihadapi petani dalam permodalan tersebut, maka pemerintah berupaya membantu meringankan beban petani dengan menetapkan serbagai skim pembiayaan bagi petani kecil yang lebih mudah diakses oleh petani kecil. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan usahatani petani kecil di Indonesia.

Jenis-jenis kredit program untuk pembiayaan pertanian yang saat ini diluncurkan Kementerian Pertanian adalah adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK-SUP 05), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) (Kementerian Pertanian 2007). Disamping itu juga ada pembiayaan syariah yang meliputi (i) pengembangan skema pembiayaan berbasis syariah; dan (ii) pengembangan kelembagaan usaha petani yang berasal dari kelompok usaha tani. Juga ada program tambahan, yaitu (i) Program fasilitasi Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3); dan (ii) Kerjasama pemanfaatan Bantuan Luar Negeri.

Data dari Kementerian Pertanian (2010) menunjukkan bahwa sampai bulan Juni 2009 sebanyak Rp 7.840.961 juta (96.29%) dari plafon Rp 8.143.400 juta KKP-E berhasil disalurkan oleh Bank Umum maupun Bank Pembangunan Daerah. Realisasi penyerapan kredit terbesar adalah untuk budidaya tebu, yaitu Rp 5,99 trilyun (73,55%), diikuti dengan pengembangan ternak (13,47%), pengembangan padi jagung, jagung dan kedelai (6,90%), pengadaan pangan (1,64%), pengembangan ubikayu, ubi jalar, koro (0,69%), dan hortikultura dan jahe (0,04%).

Realisasi penyaluran SUP sampai Februari 2009 adalah Rp 6.307.029,99 juta untuk seluruh sektor. Penyaluran untuk sektor pertanian sebesar Rp 499.777,47 juta (7,92%), sedangkan peyaluran terbesar adalah untuk sektor perdagangan sebanyak Rp 4.123.862,33 juta atau 65,38 persen (Kementerian Pertanian, 2010).

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akses petani terhadap permodalan untuk usahatani dan mengkaji keragaan penyaluran dan pengembalian kredit formal serta kendala-kendala yang dihadapi, khususnya KKP-E.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari bank pelaksana kredit program pertanian maupun dari petani penerima kredit. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait penyaluran kredit program maupun bantuan pembiayaan pertanian. Dalam hal ini digali data target dan realisasi penyaluran kredit dan bantuan, syarat dan prosedur penyaluran pembiayaan maupun kendala yang dijumpai dalam penyaluran kredit maupun bantuan tersebut.

Di Propinsi Jawa Timur, kabupaten yang terpilih sebagai sampel adalah Kabupaten Jember. Dasar pertimbangan pemilihan daerah, karena keberadaan komoditas yang mendapat pembiayaan dari program KKPE. Secara rinci jumlah responden adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Jumlah dan Jenis Responden di Provinsi Jawa Timur, 2010

No.	Jenis Responden	Jumlah Responden KKP-E dan KUR
1	Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota	3
2	Bank Penyalur (BPD, BRI, BNI)	3
3	Kelompok tani/gapoktan	4
4	Petani/peternak	30
5	Pedagang input/output pertanian penyalur kredit	3
7	<i>Key informen</i>	3
TOTAL		46

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

KKP-E adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan kepada petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan, kelompok (tani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, kacang tanah dan atau sorgum, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternak sapi potong, ayam buras dan itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai .

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang dulu dikenal dengan Kredit Ketahanan Pangan (KKP), sudah berjalan sejak Oktober 2000 merupakan penyempurnaan dari KUT, KKPA (Unggas, Tebu dan Nelayan) serta Kredit Koperasi Pangan. KKP ditujukan untuk membantu permodalan petani dan peternak dengan suku bunga terjangkau sehingga mereka dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya dan dapat mengembangkan agribisnisnya secara layak (Kementrian Pertanian 2010)

Dalam perkembangannya, KKP terus mengalami perubahan dan penyempurnaan baik dalam cakupan komoditas yang dibiayai, kebutuhan indikatif dan plafon maksimum per debitur. Penyempurnaan KKP juga ditujukan untuk mendukung ketahanan energi sehingga mulai Oktober 2007 KKP berubah menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). KKP-E adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.

Tujuan dari KKP-E adalah a) Menyediakan kredit investasi dan atau modal kerja dengan suku bunga terjangkau, b) Mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani/peternak yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna peningkatan produksi sekaligus peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya dan c) Mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi lain melalui pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

Sedangkan sasaran KKP-E adalah a) Tersalurnya KKP-E kepada petani dan peternak yang membutuhkan pembiayaan/kredit serta lancar dalam pengembalian kreditnya dan b) Peningkatan penerapan teknologi anjuran bagi petani/peternak yang memanfaatkan pembiayaan/kredit yang akhirnya terjadi peningkatan produktivitas usaha.

Dalam KKP-E ini pemerintah memberikan subsidi bunga, sehingga bunga pinjaman yang harus ditanggung debitur jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga komersial yang berlaku saat ini. Besarnya suku bunga KKP-E untuk Pengembangan Tebu yang diterima Bank maksimum LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)+5%, sedangkan untuk KKP-E subsektor lainnya maksimum LPS + 6%. Ketentuan tingkat bunga tersebut mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2007. Suku bunga KKP-E ditinjau setiap 6 (enam) bulan sekali (Ditjen Hortikultura, 2007). Dari kenyataan di lapangan suku bunga untuk tanaman pangan jauh di atas sektor lainnya yaitu 8% (contoh di Mojokerto).

Keragaan Penyaluran KKP-E

Tingkat Nasional

Penyaluran KKP-E dilaksanakan melalui institusi Bank, baik Bank Umum maupun Bank Pembangunan Daerah. Plafon KKP-E yang terbesar disediakan pada Bank Umum mencapai Rp 7,786,350 juta, sedangkan plafon pada Bank Pembangunan Daerah hanya Rp 634,200 juta (7,5 persen) dari total plafon KKP-E yang disalurkan. Terdapat 10 Bank Umum yang menjadi Bank pelaksana, yaitu BRI, BNI, Mandiri, Bukopin, BCA, Agro Niaga, BII, CIMB Niaga, Danamon dan Bank Artha Graha. Terbesar plafon KKP-E yang disediakan oleh Bank BRI mencapai Rp 4,800,000 juta, sedangkan Bank umum lainnya jauh dibawah satu Triliun, atau sekitar Rp 15,000 juta – Rp 660,000 juta. Terkecil Bank Danamon hanya Rp 15,000 juta.

Bank Pembangunan Daerah yang terlibat dalam penyaluran kredit ini sebanyak 12 Bank, yaitu BPD Jabar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Bali, BPD Kalsel, BPD Sulsel, BPD Papua, BPD Riau. Terbesar plafon yang disediakan oleh BPD Jatim dan BPD Bali, masing-masing Rp 256,000 juta dan Rp 107,405 juta, sedangkan BPD lainnya dibawah Rp 100 000 juta.

Realisasi penyaluran KKP-E Bank Umum posisi sampai Maret 2010 (secara kumulatif) telah mencapai Rp 8,774,621 juta, terbesar Bank BRI telah mencapai realisasi penyaluran (kumulatif) Rp 4,635,056 juta, sedangkan Bank Umum lainnya jauh dibawah pencapaian Bank BRI. Terbesar kedua penyaluran KKP-E dari kelompok bank Umum adalah Bank Agro Niaga, telah mencapai Rp 1,540,400 juta, dan terkecil adalah Bank BCA baru mencapai Rp 40,508 juta. Secara keseluruhan penyaluran KKP-E dari kelompok Bank Umum ini telah melebihi nilai plafon yang disediakan (112,69 %). Sedangkan realisasi penyaluran pada Bank Pembangunan Daerah mencapai Rp 631,177 juta yang berarti sedikit dibawah plafon yang disediakan. Realisasi terbesar dari Bank Pembangunan Daerah adalah BPD Jatim mencapai 107 persen dari plafon, sedangkan BPD Jatim mencapai 220 persen dari plafon dan BPD Kalsel 109 persen dari nilai plafon. Rekapitulasi realisasi penyaluran KKP-E secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Penyaluran KKP-E, Maret 2010

No	Bank Pelaksana	Plafon (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	% Thdp Plafon
I	BANK UMUM	7.786.350	8.774.621	112,69
1	BANK BRI	4.800.000	4.635.056	96,56
2	BANK BNI	518.350	455.499	87,87
3	BANK MANDIRI	480.000	682.769	142,24
4	BANK BUKOPIN	660.000	935.086	141,68
5	BANK BCA	55.000	40.508	73,65
6	BANK AGRO NIAGA	508.000	1.540.400	303,23
7	BANK BII	130.000	70.875	54,52
8	BANK CIMB NIAGA	170.000	354.780	208,69
9	BANK DANAMON	15.000	59.648	397,65
10	BANK ARTHA GRAHA	450.000	0	0,00
II	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	634.200	631.177	99,52
1	BPD JABAR	72.000	63.048	87,57
2	BPD JATENG	54.120	29.341	54,21
3	BPD DIY	10.025	5.699	56,85
4	BPD JATIM	256.000	273.686	106,91
5	BPD SUMUT	14.165	317	2,24
6	BPD SUMBAR	4.000	2.405	60,13
7	BPD SUMSEL	20.000	3.086	15,43
8	BPD BALI	107.405	236.724	220,40
9	BPD KALSEL	5.485	6.013	109,63
10	BPD SULSEL	1.000	440	44,00
11	BPD PAPUA	55.000	7.998	14,54
12	BPD RIAU	35.000	150	0,43
	9 BPD Ex KKP		2,270	
T O T A L		8.420.550	9.405.798	111,70

Sumber: Bank Indonesia 2010

Berdasarkan kegiatannya, pemanfaatan KKP-E dapat digunakan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman perkebunan khususnya tebu, budidaya tanaman sayuran atau hortikultura, untuk pengembangan peternakan dan untuk pengadaan hasil pangan. Secara kumulatif, pemanfaatan KKP-E yang dimulai sejak tahun 2001 ini terbesar untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu mencapai Rp 7.041.036 juta atau 74,8% dari total penyaluran KKP-E. Sedangkan terbesar kedua untuk pengembangan sub sektor peternakan, mencapai Rp 1.459.862.juta dan terbesar ketiga untuk budidaya tanaman pangan Rp 745.146 juta.

Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) melalui BRI masih didominasi oleh pengembangan budidaya tanaman tebu. Seperti terlihat pada Tabel 3. *outstanding* penyaluran KKP-E pada tanaman ini per Maret 2010 mencapai Rp 669.174 juta atau sebesar 50,82% dari

total kucuran kredit KKP-E BRI, diikuti oleh ternak sebanyak 31,59%. Sementara, pengembangan penyaluran KKP-E BRI untuk tanaman pangan tercatat sebagai yang terkecil, yaitu Rp 38.048 juta atau 2,89% dari total KKP-E yang disalurkan BRI. Dari total penyaluran per Kanwil BRI, BRI Malang dalah penyalur KKP-E BRI terbesar, yaitu Rp 390.832 juta.

Tabel 3. Penyaluran KKP-E BRI per Kanwil, Maret 2010 (Rp juta)

No	Kanwil	Inten	Tebu	Pangan	Ternak	Total
1	Banda Aceh	0	0	0	0	0
2	Medan	1.774	0	2.994	2.779	7.547
3	Padang	1.426	0	0	2.214	3.640
4	Pekanbaru	0	0	0	951	951
5	Palembang	16.831	28.492	399	56.373	102.095
6	Jakarta 1	0	0	0	0	0
7	Jakarta 2	37.379	0	0	0	37.379
8	Jakarta 3	47	0	0	2.752	2.799
9	Bandung	12.237	119.956	10.927	11.056	154.176
10	Semarang	6.389	143.412	9.288	51.962	211.051
11	Yogyakarta	17.123	41.787	3.680	44.114	106.704
12	Surabaya	2.763	61.487	0	6.405	70.655
13	Malang	33.754	263.615	8.287	85.176	390.832
14	Denpasar	6.054	22	1.598	110.635	118.309
15	Banjarmasin	40.408	0	273	19.860	60.541
16	Makassar	17.447	10.403	602	21.742	50.194
17	Manado	0	0	0	0	0
Total		193.632	669.174	38.048	416.019	1.316.873
Persentase		14,70	50,82	2,89	31,59	100,00

Sumber: BRI Pusat Jakarta 2010

Selain bank BRI yang menyalurkan KKP-E ditingkat daerah disalurkan juga oleh bank penyalur KKP-E tingkat propinsi seperti Bank Pembangunan Daerah di Jawa Timur adalah Bank Jatim. Dari hasil perkembangan KKP-E yang disalurkan oleh Bank Jatim untuk KKP-E Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu, ubijalar, kacang tanah dan sorghum), dan untuk komoditas ubikayu KKP-E yang disalurkan dibedakan bagi budidaya ubikayu untuk pangan dan budidaya ubikayu untuk energi. Selain itu, berdasarkan *plafond*, sector peternakan mempunyai *plafond* yang paling tinggi disusul oleh tebu, Namun realisasi penyalurannya, tebu mempunyai persentase tertinggi (44,93%). Kemudahan mengorganisasi penyaluran dan pengembalian, menyebabkan bank mudah mengalirkan dana untuk budidaya tebu, disamping itu organisasi petani tebu atau koperasi melalui Pabrik Gula mempunyai kemudahan dalam memperoleh kredit program. Pasar yang relative tertutup bagi komoditas tebu merupakan jaminan pendapatan dan koordinasi sehingga memudahkan pengembalian kredit. Realisasi penyaluran terendah adalah untuk budidaya tanaman ubikayu, ubijalar, kacang tanah dan sorghum sebesar 7,81% dari *plafond* yang ditentukan.

Penyaluran KKP-E ditingkat Kanwil BRI

Pada Tabel 5, memperlihatkan bahwa sebagai bank wilayah Malang dalam penyaluran KKP-E tahun 2010 senilai Rp 390.832 juta yang terdiri dari KKP-E Inten (8,6%), KKP-E Tebu (67,4%), KKP-E Pangan (2,1%), dan KKP-E Ternak (21,8%) . Sementara itu, posisi BRI cabang Jember dalam pelaksanaan penyaluran program KKP-E di wilayah Kanwil Malang mempunyai pangsa sebesar 7,1% dari seluruh total penyaluran. Pangsa penyaluran yang terbesar berturut-turut adalah BRI cabang Kediri (16,4%), Magetan (12,1%), Malangkhawi (10,2%), sedangkan BRI Cabang Madiun dan Ngawi masing-masing 9%. Namun demikian, penyaluran KKP-E di BRI cabang Jember lebih lengkap keseluruhan sub sektor pertanian dibanding kantor cabang BRI lainnya. Jenis KKP-E yang mendapat penyaluran dari BRI Cabang Jember terdiri dari program KKP-E inten (42,3%), KKP-E Tebu (4,7%), KKP-E Pangan (11,5%) dan KKP-E Ternak (0,3%).

Tabel 5. Penyaluran KKP-E per Cabang BRI di Kanwil BRI Malang, 2010 (Rp juta)

No	Kanwil	KKP-E				Total
		KKP-E Inten	KKP-E Tebu	KKP-E Pangan	KKP-E Ternak	
1	Banyuwangi	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1
2	Blitar	1.9	0.0	0.0	15.2	3.5
3	Bondowoso	9.1	3.9	0.0	4.1	4.3
4	Jember	42.3	4.7	11.5	0.3	7.1
5	Kediri	0.0	17.6	4.2	20.1	16.4
6	Lumajang	1.9	3.2	0.0	0.2	2.4
7	Madiun	1.2	13.6	7.2	0.7	9.6
8	Magetan	0.0	17.9	0.0	0.0	12.1
9	Malangkhawi	0.0	15.2	0.0	0.0	10.2
10	Marthadinata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Nganjuk	2.8	3.8	1.7	2.6	3.4
12	Ngawi	0.0	2.8	75.4	27.4	9.4
13	Pacitan	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4
14	Pasuruan	1.4	2.8	0.0	0.7	2.2
15	Ponorogo	16.0	0.0	0.0	11.0	3.8
16	Probolinggo	20.8	2.0	0.0	1.0	3.4
17	Situbondo	0.0	6.5	0.0	0.0	4.4
18	Trenggalek	0.0	1.2	0.0	1.2	1.0
19	Tulungagung	2.7	4.8	0.0	13.2	6.3
20	Blimbing	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total (Rp juta)		33754.	263615	8287	85176	390832.0
(%)		8.6	67.4	2.1	21.8	100

Sumber: BRI Kanwil Malang Posisi Maret 2010

Lebih lanjut ditingkat kabupaten Jember memperlihatkan bahwa perkembangan penyaluran KKP-E pada posisi April 2010 yang terdaftar dari Cabang BRI Jember, terdiri dari kredit KPP-E pengadaan Pangan, Pelagung, Peterenakan, Hortikultura dan Kacang tanah maupun sorghum (Tabel 6). Dari total *plafond* KKP-E yang tersedia pada Cabang BRI Jember jumlah yang terserap mencapai 77,6%. Sementara itu, dari masing-masing KKP-E, realisasi penyaluran yang sesuai dengan jumlah *plafond* adalah KKP-E Peternakan dan Hortikultura yang mencapai 100% dan yang terendah KPP-E Tebu Rakyat mencapai 61,7%. Jumlah kelompok yang memperoleh KKP-E yang terbesar jumlahnya berturut-turut adalah kelompok yang memperoleh KKP-E Pelagung (48KT), KKP-E kacang dan sorghum (15 KT), KKP-E Ternak (5 KT).

Terbatasnya jumlah kelompok yang terlibat didalam penyaluran KKP-E, hal ini didukung oleh kehati-hatian pihak per Bankan untuk menanggung resiko kegagalan dalam pengembalian kredit. Oleh karena itu bagi kelompok atau koperasi yang akan memperoleh KKP-E disyaratkan bahwa kelompok harus; (1) kelompok telah terdaftar pada dinas teknis setempat, (2) mempunyai kegiatan usaha yang mandiri, (3) mempunyai anggota yang melakukan usaha budidaya yang dapat dibiayai KKP-E, (4) mempunyai organisasi dan pengurus serta aturan didalam kelompok dan bagi koperasi disyaratkan; (1) koperasi harus sudah berbadan hukum, (2) memiliki pengurus yang aktif, (3) memenuhi persyaratan, (4) memiliki anggota yang terdiri dari petani dan (5) memiliki bidang usaha di sektor pertanian.

Tabel 6. Jumlah Kelompok/KUD, Plafond dan Penyaluran menurut Jenis Program Kredit KKP-E di Wilayah Kantor BRI Cabang Jember, 2009.

No	Jenis KKP-E	Jumlah Kelompok	Plafond	Penyerapan(Rp)	(%)
1	Pengadaan Pangan	2 KUD	1,000,000,000	940,109,589	94.0
2	Tebu Rakyat	3 KPTR	20,343,255,600	12,543,887,186	61.7
3	Pelagung	48 KT	11,506,623,500	10,621,489,528	92.3
4	Peternakan	5 KT Peternak	2,250,000,000	2,247,200,000	99.9
5	Hortikultura	3 KT	1,008,556,000	1,008,556,000	100.0
6	Kacang tanah dan Sorgum	15 KT	2997300000	2997300000	100.0
Total			39,105,735,100	30,358,542,303	77.6

Sumber : BRI Cabang Jember, Posisi April 2010.

Penyaluran KKP-E Bank Jatim Cabang Jember

Penyaluran kredit KKP-E melalui Bank Jatim Cabang Jember pada tahun 2009/2010 terdiri dari KKP-E Tebu Rakyat Pola Murni dan KKP-E Ternak Sapi potong. *Plafond* kredit KKP-E Tebu Rakyat Pola murni pada musim tanam 2009/2010 senilai Rp 2 milyar untuk mendanai 210.527 hektar tanaman tebu TRS II di wilayah PG Semboro, Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang dimanfaatkan oleh 3 kelompok tani dan KKP-E Ternak Sapi Pola Murni di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebanyak 78 ekor dengan plafond kredit Rp 500.juta yang digunakan untuk satu kelompok peternak. Pengajuan kredit KKP-E Tebu dan sapi potong dijembatani oleh Koperasi Simpan Pinjam sebagai mitra usaha kelompok tani. Kegiatan kerja sama memperoleh kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian. Oleh karena dalam pengajuan kredit ke Bank, persyaratan permohonan kredit, yang diberlakukan hanya pada mitra kelompok, sebagai berikut (1) Permohonan kredit, (2) Susunan pengurus, (3) Petikan berita acara rapat anggota, (4) TDP dan NPWP, (5) Akate pendirian koperasi/anggaran dasar, (6) Anggaran rumahtangga, (7) RAT/RAB tahun 2008, (8) Neraca 2 tahun terakhir dan neraca Agustus 2009, (9) Fotocopy jaminan, (10) Satu bendel RDKK (susunan pengurus, surat kuasa petani lepada kelompok, surat kuasa kelompok tani lepada koperasi, RDKK, Rencana penarikan dan pengembalian kredit, *cash flow* dan rencana R/L dalam waktu 24 jam).

Penyaluran KKP-E ditingkat Petani

Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa penyaluran KKP-E kepada kelompok tani lebih banyak digunakan untuk pembiayaan budidaya cabe merah, ternak sapi dan kacang tanah, dengan bank penyalur yang melayani KKP-E kepada petani adalah Bank BRI dan Bank Jatim Cabang

Jember. Sementara itu, tingkat pendidikan petani yang terbanyak adalah SLTA dan SD masing-masing sekitar 41 persen dan SLTP sekitar 18 persen (Tabel 7)

Tabel 7. Karakteristik Penerima KKP-E di Wilayah Kabupaten Jember, 2009

Uraian	Jenis KKP-E			Total
	Cabe	KacangTanah	Ternak sapi	
1. Bank Penyalur	BRI Cab Jember	BRI Cab Jember	BPD Cab Jember	
2. Tingkat Pendidikan penerima KKP-E (%)				
a. SD	-	67	75	41
b. SLTP	20	33		18
c. SLTA	80		25	41
3. Jenis Agunan (%)				
a. Tanpa Agunan	60		50	42
b. Akte Tanah		67	25	33
c. Sertifikat	40	33	25	25
4. Sebagai anggota KT	100	100	100	100
5. Prosedur pencairan				
a. Mudah	100	100	100	100
c. Sulit				
6. Rata-rata waktu pencairan (minggu)	9.6	2	4	5.8

Sumber: data primer 2010.

Bentuk jaminan yang digunakan sebagai agunan didalam memperoleh dan akses kredit KKP-E yang umum adalah berupa akte tanah (33%) dan sertifikat (25%) dan yang tidak mengagunkan lebih banyak (42%) dibanding dengan yang mengagunkan lahan sebagai jaminannya. Salah satu hal yang umum dikeluhkan masyarakat adalah agunan, termasuk dalam kredit program. Namun sebetulnya menurut pihak bank, agunan tersebut bukan syarat mutlak dan hanya difungsikan sebagai pengikat agar ada motivasi bagi debitur untuk lebih serius dalam mengelola pinjaman. Ada kesan jika tanpa agunan, maka dianggap kredit tersebut gratis dan tidak perlu dikembalikan. Dilain pihak bagi anggota yang tidak mengagunkan jaminan dapat diupayakan melalui tanggung renteng oleh beberapa orang dalam kelompok yang memiliki agunan sebagai jaminannya

Lama waktu pencairan yang dihitung mulai melakukan persiapan hingga pecairan kredit rata-rata 5.8 minggu dan terlama pencairan KKP-E cabe hingga 9 minggu. Disamping itu, petani sebagian besar mengatakan bahwa prosedur pencairan kredit dari bank kekelompok tani dan dari kelompok tani ke petani sangat mudah tanpa prosedur yang berbelit. Namun demikian lama waktu pencairan kredit yang sangat lama akan menghambat pelaksanaan budidaya. Terutama pada saat pencairan kredit kondisi tanaman sudah ditanam, yang akhirnya akan mengganggu proses produksi. Bagi pihak perbankan dalam penyaluran KKP-E diperlukan kehati-hatian, karena semua resiko akan menjadi tanggung jawab pihak bank sendiri. Oleh karena itu persyaratan kinerja kelompok tani yang sudah memperoleh pengesahan, sayogyannya perlu kemitraan dengan perusahaan, baik itu dalam bentuk asosiasi, koperasi yang menjamin pengadaan sarana produksi, bimbingan dan penyuluhan jaminan pemasaran hasil produksi

Bila dilihat dari intensitas sumber pembiayaan, menunjukkan bahwa proses penyaluran kredit KKP-E komoditas Cabe, Kacang tanah dan Ternak Sapi potong di daerah penelitian dilaksanakan pada tahun 2009 dengan rata-rata frekuensi penerimaan kredit baru satu kali (Tabel 8).

Tabel 8. Intensitas Pemanfaatan Sumber Pembiayaan KKP-E di Jember, 2009.

Uraian	Jenis KKP-E			Total
	Cabe	KacangTanah	Ternak sapi	
1. Tahun penerimaan Skim Th 2009	100	100	100	100
2. Jenis SKIM yang diambil				
a. KUR				
b. KKP-E	100	100	100	100
c. KUPEDES				
d. Lainnya				
3. Jumlah Frekuensi penerimaan 1kali	100	100	100	100
4. Saluran Penerimaan Skim				
a. Perorangan				
b. Kelompok	100	100	100	100
5. Alasan Memilih SKIM				
a. Bunga ringan	60		50	33
b. Peryaratan mudah	20	67	20	33
c. Plafond fleksibel	20	33		25
d. Tanpa agunan	0		20	9
6. Tempat Pengambilan Skim				
a. Kelompok TANI	100	100	100	100
b. Koperasi				
c. Bank				

Sumber: data primer 2010

Hal ini menunjukkan bahwa sejak diluncurkannya program KKP-E tahun 2007, partisipasi petani yang memanfaatkan kredit KKP-E untuk pembiayaan budidaya pertanian masih rendah. Umumnya jenis kredit KKP-E yang diambil anggota harus melalui kelompok tani. Hal ini sesuai dengan persyaratan prosedur penyaluran KKP-E yang memberdayakan kelompok sebagai wadah bagi petani dalam melakukan kegiatan budidaya komoditas tertentu secara bersama. Oleh karena itu wadah kelompok tani merupakan tempat penyaluran dan pengambilan kredit serta pengembalian kredit yang diatur berdasarkan ketetapan pihak perbankan dan aturan yang berlaku didalam kelompok sendiri. Dilain pihak, alasan petani memilih jenis kredit KKP-E sangat bervariasi diantaranya ada 33 persen yang memilih karena bunga ringan dan persayaratan mudah, 25 persen karena plafondnya fleksibel dan 9 persen karena tanpa agunan. Berbagai alasan yang dikemukakan petani dalam mengakses KKP-E, hal ini untuk menghindari kesan yang selama ini sangat *rigid* untuk mengakses kredit ke sumber pembiayaan formal atau perbankan.

Didaerah penelitian menunjukkan bahwa keragaan pemanfaatan kredit KKP-E yang diterima petani mempunyai pola yang berbeda dan tergantung dari jenis komoditas yang dibiayai serta usaha yang dijalankan. Pada KKP-E sapi potong keragaan uang yang resmi diterima jauh lebih besar (Rp 51,750 juta/petani) dibanding biaya yang resmi diterima untuk usaha budidaya kacang tanah (Rp 6,2 juta/petani) dan cabe (Rp 9,2 juta/petani). Besarnya biaya KKP-E ternak sapi terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah berupa uang pembelian sapi, pembelian dedak, obat cacing, pembelian rumput, tenaga kerja, viatamin, konsentrat, biaya kandang dan tenaga (Tabel 9).

Tabel 9. Keragaan Pemanfaatan Kredit KKP-E pada usaha Budidaya komoditas cabe, kacang tanah dan sapi potong di Jember, 2009

Uraian	Jenis KKP-E			Total
	Cabe	KacangTanah	Ternak sapi	
1. Rataan uang resmi yang diterima (Rp 000)	6.200 (100)	9.000 (100)	51.750 (100)	22.083,3 (100)
2. Rataan uang riil yang diterima (Rp 000)	6.036 (97,4)	8.701,6 (96,7)	51.232,5 (99)	21.767,9 (98,6)
3. Total biaya pengurusan hingga pencairan Rp 000)	274 (4,4)	298.3 (3,3)	517.5 (1)	361.2 (1,6)
4. Jangka waktu pengembalian (Minggu)	12	12	24	16
5. Bunga kredit (%/Th)	6,2	6,3	6,2	6.2
6. Masa Tenggang waktu (hari)	264	120	630	350
7. Sistem Penyaluran (%)				
a. Petani langsung ke Bank				
b. Melalui Kelompok Tani	100	100	100	100
c. Melalui PPL				
d. Melalui petugas Bank				
8.. Rata-rata perkiraan nilai agunan (Rp 000)	17.500	190.000	287.500	150.625
9. Nilai Pengembalian (Rp 000)	6.648	9.540	55.235	25.366,6

Sumber: data primer 2010

Sementara itu, uang yang riil diterima petani lebih rendah dibanding uang resmi yang diterima, seperti KKP-E cabe tinggal 97,4% dari uang resmi yang diterima dan KKP-E kacang tanah hingga 96,7% dan KKP-E ternak sapi 99%. Besarnya potongan dari masing-masing KKP-E berdasarkan atas kesepakatan anggota kelompok terhadap kelompoknya yang digunakan untuk biaya pembuatan proposal, biaya transportasi dan akomodasi selama pengurusan hingga akad kredit, biaya administrasi kelompok, notaris dan kesejahteraan desa. Besarnya biaya potongan dari masing-masing penerima KKP-E bervariasi, untuk KKP-E cabe kesepakatan biaya potongan mencapai 4,4% dari total penerimaan, 3,3% untuk penerima KKP-E kacang tanah dan 1% untuk KKP-E ternak sapi potong.

Masa tenggang waktu pembayaran kembali untuk KKP-E Ternak rata-rata hingga 630 hari, KKP-E kacang tanah 120 hari dan KKP-E cabe 264 hari. Lamanya tenggang waktu KKP-E yang diberikan pada usaha budidaya tanaman semusim akan memberikan kelonggaran bagi petani, karena biaya yang diterima bisa digunakan untuk 3 kali musim tanam.

Dilain pihak besarnya tingkat bunga bersubsidi KKP-E dari perbankan rata-rata berkisar 6 persen pertahun, namun berdasarkan kesepakatan diantara para anggota ditetapkan tingkat bunga pinjaman dari kelompok tani ke anggota kelompok ditetapkan antara 10 persen hingga 12 persen pertahun. Sedangkan pola pengembalian dari kelompok tani ke perbankan sangat fleksibel yaitu dengan pembayaran bunga diawal dan pengembalian uang pokok diakhir tenggang waktu yang diberikan, baik itu diangsur atau pembayaran sekaligus.

Dalam hal pengembalian kredit program KKP-E, hingga pelaksanaan penelitian berlangsung masih belum terealisasi perlunasannya. Hal ini karena masa tenggang waktu yang di berikan belum berakhir, Namun diperkirakan besarnya nilai pengembalian yang dihitung dengan bunga senilai Rp 6.648.000 untuk KKP-E Cabe, Rp 9.540.000 untuk KKP-E Kacang tanah dan Rp 55.235.000 untuk KKP-E Ternak sapi potong.

Sebagai rasa tanggung jawab petani terhadap sejumlah kredit yang diberikan oleh perbankan kepada petani/kelompok tani, pihak per bankan memberikan insentif bagi yang tepat waktu membayar kembali kreditnya dan memberikan sanksi bagi terlambat membayar atau menunggak. Jenis insentif yang diberikan oleh perbankan kepada petani adalah mempercepat waktu pengambilan kredit berikutnya. Sementara sanksi yang dilakukan adalah membayar kewajiban hutangnya dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, serta penahanan bukti surat jaminan (agunan) dengan tetap diberlakukan untuk membayar tunggakan dan bunganya.

Hambatan Akses kredit

Hambatan akses KKP-E di Kabupaten Jember

Kemampuan petani berkelompok dan bekerjasama didalam kelompok masih kurang, sehingga sebagai salah satu syarat akses ke KKP-E belum terpenuhi. Dan umumnya pembentukan kelompok masih bersifat program, belum menunjukkan kemandirian sebagai kelompok tani yang memperoleh pengesahan dari instansi/dinas terkait. Sifat kemandirian kelompok dalam kegiatan kerja sama belum menunjukkan kinerja pengurus yang aktif serta belum berjalannya aturan main yang ditetapkan didalam kelompok yang disepakati seluruh anggota.

Jangkauan KKP-E masih terbatas pada kelompok tani yang ada di wilayah kecamatan, oleh karena itu belum seluruh kelompok di pedesaan yang dapat akses kesumber pembiayaan dengan kredit program KKP-E. Belum ada bimbingan dan sosialisasi program KKP-E baik itu dari pihak Perbankan atau dinas terkait kepada seluruh kelompok tani, sehingga kelompok tani sangat sulit mengakses program kredit KKP-E yang diluncurkan oleh pemerintah.

Hambatan ditingkat petani yang akses kredit KKP-E adalah harus ikut serta menjadi anggota kelompok tani dan tidak semata-mata secara pribadi langsung akan memperoleh kredit KKP-E. Disamping itu permasalahan agunan sebagai jaminan akad kredit yang menjadi syarat jarang terpenuhi oleh petani, misalnya agunan berupa sertifikat lahan atau surat berharga lainnya. Ataupun kalau menjadi jaminan, umumnya nilai agunan yang digunakan sebagai jaminan jauh lebih rendah dari nilai riilnya.

Bagi petani yang akan memperoleh KKP-E harus petani pemilik penggarap lahan sendiri atau penggarap lahan orang lain yang harus diketahui oleh pejabat desa. Disamping itu budidaya tanaman yang diusahakan harus sesuai dengan permintaan pasar, jaminan harga yang jelas, sehingga dalam uji kelayakan usaha lebih memungkinkan untuk dibiayai melalui kredit program KKP-E. Demikian halnya pelaksanaan uji kelayakan sangat memberatkan petani yang akan akses, karena memerlukan waktu luang untuk mengurusnya.

Ditingkat daerah, terutama instansi teknis terkait belum secara langsung terkoordinasi dengan pihak perbankan dalam akses KKP-E. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belum ada kegiatan sosialisasi secara bersama-sama dengan pihak perbankan tentang penyaluran KKP- E kepadapetani/kelompok tani.
2. Belum dilaksanakan koordinasi penyaluran KKP-E dan umumnya petani/kelompok tani berhubungan langsung dengan per bankan.
3. PPL sebagai petugas dilapang hanya sebatas mengetahui pelaksanaan transaksi kredit tanpa sepengetahuan induk unit kerja.
4. Belum ada laporan kemajuan pelaksanaan kredit baik yang berasal dari pihak perbankan atau petugas lapang, sehingga tidak terditeksi perkembangannya.

Kendala Pengembalian KKP-E

Dari pengamatan di lokasi contoh, sebagian besar petani atau peternak debitur KKP-E tidak mempunyai masalah dalam pengembalian KKP-E selama kredit KKP-E tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tidak adanya ketentuan yang kaku mengenai cara pengembalian kredit, memberikan kemudahan bagi petani/peternak debitur kredit.

Dari pengalaman pihak perbankan, misalnya BRI, secara umum KKP-E pangan berjalan baik. Namun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan untuk meminimalkan potensi kemacetan atau penyalahgunaan. Dengan tingkat suku bunga KKP-E yang relatif rendah, dikhawatirkan jika ada pengawasan yang ketat dapat dipinjamkan lagi ke pihak lain dengan bunga yang lebih tinggi. Ada indikasi juga ada sekelompok elit yang meminjam KKP-E untuk membantu kelompok pendukungnya yang sebagian besar petani/peternak. Memang bagi pihak perbankan tidak menjadi masalah karena penerima tetap petani/peternak, bahkan kelompok elit tersebut bersedia menjamin pengembalian dana tersebut seandainya ada permasalahan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Petani Mengakses Permodalan

Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kemampuan petani dalam mengakses sumber permodalan antara lain:

- (1) Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang pemahaman prosedur kredit yang dikeluarkan oleh bank penyalur skim kredit program. Selain itu, pendidikan menyebabkan petani lebih aktif dalam mengakses sendiri berbagai sumber informasi mengenai permodalan.
- (2) Ketiadaan agunan merupakan kendala utama bagi petani untuk mengakses ke sumber permodalan. Walaupun demikian, untuk kredit program seperti KKP-E ada keringanan bagi kelompok tani untuk mengajukan agunan dengan sertifikat milik pengurus asalkan nilainya lebih tinggi daripada dengan kredit yang diajukan, disertai dengan rekomendasi Dinas Pertanian setempat (PPL).
- (3) Petani yang aktif di kelompok tani maupun asosiasi petani mempunyai peluang lebih besar untuk dapat mengakses permodalan, terutama kredit program maupun bantuan permodalan pemerintah. Dari fakta selama ini, hampir semua bantuan/kredit modal disalurkan melalui kelompok tani.
- (4) Pengalaman pinjaman sebelumnya. Beberapa petani yang pernah mendapat kredit program, umumnya memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga pembiayaan. Minimal mereka sudah berpengalaman dan lebih paham tentang prosedur pengajuan kredit.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal (di luar individu petani) yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan baik kredit program maupun komersial adalah sebagai berikut:

- (1) Kendala utama petani dalam mengakses kredit, baik program maupun komersial adalah persyaratan yang ketat dari pihak perbankan. Walaupun bersifat kredit program, namun tetap harus memenuhi persyaratan standar mengingat dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari perbankan (Executing). Perbankan menetapkan persyaratan 5 C (*collateral, character, capacity, capital, condition*), dan umumnya syarat yang paling sulit dipenuhi adalah *collateral/agunan*.

- (2) Akses petani terhadap sumber permodalan sangat dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan pemerintah apakah akan tetap mengadakan/meneruskan kredit program atau tidak. Jika kredit program tetap menjadi prioritas kebijakan, peluang akses petani menjadi semakin besar dan sebaliknya.
- (3) Keberadaan fasilitator atau mediator untuk menjembatani petani dan perbankan sangat menentukan aksesibilitas petani terhadap kredit program/komersial. Dalam kasus KKP-E, misalnya, peran PPL sangat besar untuk membantu petani dalam mengajukan kredit ke perbankan. Keaktifan mediator dalam membimbing petani dan menyosialisasikan kredit program menjadi faktor yang cukup crucial.
- (4) Belum adanya kepastian harga produk pertanian menyebabkan sector ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi akibat fluktuasi harga yang tajam. Kondisi ini menjadikan pihak perbankan (lembaga pembiayaan) harus berhati-hati untuk memilih komoditas dan timing yang tepat dalam membiayai sector pertanian sehingga tidak terlalu mudah untuk memberikan persetujuan kredit bagi pelaku usaha pertanian.

KESIMPULAN

Sejak dilakukan penyempurnaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi pada tahun 2007, pemanfaatan kredit pertanian yang disalurkan oleh Bank Umum maupun Bank Pembangunan Daerah untuk KKP-E telah mencapai 96,29 persen. Diantaranya yang terbanyak ada KKP-E budidaya tebu, yaitu 73,55%, diikuti dengan pengembangan ternak 13,47%, pengembangan padi jagung, jagung dan kedelai (6,90%), pengadaan pangan 1,64%, pengembangan ubikayu, ubi jalar, koro (0,69%), dan hortikultura dan jahe 0,04%.

Penyaluran KKP-E di tingkat kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Cabang BRI Jember, terdiri dari kredit KPP-E pengadaan Pangan, Pelagung, Peterenakan, Hortikultura dan Kacang tanah maupun sorghum yang terserap mencapai 77.6 persen. Kondisi ini didukung oleh kehati-hatian pihak per Bankan untuk menanggung resiko kegagalan dalam pengembalian kredit.

Penyaluran KKP-E ditingkat petani lebih banyak ditekankan kepada kelompok tani yang sudah terdaftar sebagai organisasi kelompok dengan jumlah plafon kredit sesuai dengan komoditas yang diusahakan. Namun demikian terhambat oleh persyaratan yang menjadi standard pencairan kredit oleh lembaga pembiayaan yaitu agunan yang jarang dimiliki para petani. Disamping itu proses pencairan kredit kurang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, sehingga menghambat proses usahatani yang sedang dijalankan.

Terjadinya hambatan akses petani terhadap KKP-E yang disebabkan belum madirinya kelompok tani, yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai debitur pada kredit program. Disamping itu jangkauan kredit program KKP-E wilayah tertentu sehingga kelompok tani sangat sulit mengakses program kredit KKP-E yang diluncurkan oleh pemerintah. Demikian halnya persyaratan agunan berupa sertifikat lahan atau surat berharga lainnya yang menjadi jaminan, umumnya nilai agunan yang digunakan sebagai jaminan jauh lebih rendah dari nilai riilnya.

Oleh karena itu, agar penyaluran KKP-E dapat diakses petani, hendaknya perlu sosialisasi dengan instansi terkait yang secara langsung terkoordinasi antara petani/kelompok tani berhubungan langsung dengan per bankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2008. Statistik Indonesia. Jakarta.
- Bank Indonesia 2010. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Bank Indonesia. Jakarta.
- Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 2010. Perkembangan KKP-E. Surabaya.
- Bank Rakyat Indonesia 2010. Laboran Kredit Ketahanan KKP-E. Tanaman Tebu Rakyat, Tanaman Pangan, Ternak, Tanaman Horticultura, dan Pengadaan Pangan. Jakarta.
- Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang, 2010. Laporan Penyaluran KKP-E. Malang.
- Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember. 2010. Laporan Penyaluran KKP-E. Jember.
- Braveman, A. And J. L. Gausch. 1989. Rural Credit in Development Countries. Working Paper series 219. The World Bank, Washington DC.
- Direktorat Jendral Hortikultura. 2007. Laporan Pengembangan KKP Tanaman Hortikultura. Jakarta.
- Kementrian Pertanian. 2010. Pedoman Umum Kredit Ketahanan Pangan – Energi (KKPE) Jakarta.
- Sudaryanto, T. dan M. Syukur. 200. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekoonomi Pedesaan. Mimeo. Puslitbang Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian.
- Syukur, M., Sugiarto., Hendiarto., Budi Wiryono. 2003. Analisis Rekayasa Pembiayaan Pembiayaan Usaha Pertanian . Laporan Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian.
- Yunus, M. 1981. Credit for Self-Employment: A Fundamental Human Right. Grameen Bank, Bangladesh.